

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN SELINGKAR WILIS KABUPATEN NGANJUK

**Rr. Erny Kartika Indryastuti<sup>1)</sup>, M. Daimul Abror<sup>2)</sup>, Teguh Pramono<sup>3)</sup>**

1) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

2) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

3) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

\*Email Korespondensi: [ernyquntoro@gmail.com](mailto:ernyquntoro@gmail.com)

Submitted: 12-12-2023 | Accepted: 30-01-2024 | Published: 05-01-2024

<p><b>Kata Kunci:</b> Implementasi Kebijakan Publik; Pariwisata; Selingkar Wilis</p>	<p><b>Abstrak</b> Daya tarik wisata yang dikelola dan dikembangkan oleh Disporabudpar Kabupaten Nganjuk adalah wisata alam dan wisata buatan. Pemda belum optimal mengiklankan wisata tersebut sehingga potensi daya tariknya belum berkembang optimal. Pengembangan sektor pariwisata membutuhkan strategi dengan pola pengembangan tersusun dan terencana agar optimal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2019 dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian berupa penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan selingkar wilis kurang baik, dimana kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya kurang memadai, waktu implementasi yang molor bahkan stagnan dan finansial, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sektor formal yang cenderung apatis, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik kurang kondusif. Faktor pendukungnya meliputi: standar, sasaran, tujuan kebijakan, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sektor informal, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Faktor penghambatnya : sumberdaya manusia, waktu dan finansial, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sektor formal, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.</p>
<p><b>Keywords:</b> Implementation of Public Policy; Tourism; Selingkar Wilis</p>	<p><b>Abstract</b> <i>The tourist attraction managed and developed by the Disporabudpar of Nganjuk Regency is natural tourism and artificial tourism. The local government has not optimally advertised the tour so that the potential attraction has not developed optimally. The development of the tourism sector requires a strategy with a structured and planned development pattern to be optimal. This study aims to describe and analyze the Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2019 in Tourism Development in the Selingkar Wilis Area and its supporting and inhibiting factors. Research methods in the form of qualitative research with descriptive research types. The results showed that the implementation of tourism development policies</i></p>

*in the Selingkar Wilis area was not good, where the quality and quantity of human resources were inadequate, the implementation time was delayed and even stagnant and financial, the characteristics and dispositions of formal sector implementing agents tended to be apathetic, and the economic, social, and political environment was less conducive. Supporting factors include: standards, objectives, policy objectives, characteristics and dispositions of informal sector implementing agents, communication between organizations and implementing activities. Inhibiting factors: human resources, time and finance, characteristics and dispositions of formal sector implementing agents, and economic, social, and political environment.*

## **PENDAHULUAN**

Daya tarik wisata yang dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk adalah wisata alam dan wisata buatan. Pemerintah daerah belum berperan optimal dalam mengiklankan wisata tersebut sehingga potensi dan daya tariknya belum berkembang optimal. Pengembangan potensi sektor pariwisata membutuhkan sebuah strategi dengan pola pengembangan yang tersusun dan terencana agar optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dalam Pengembangan Pariwisata di kawasan Selingkar Wilis Kabupaten Nganjuk dan juga faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi situasi ataupun fenomena tertentu. Lainnya, dimana data ini yang selanjutnya akan dianalisis dan dideskripsikan. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan digunakan model interaktif yang dikembangkan (Miles & Huberman, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2005) mengenai implementasi kebijakan dari aspek standar dan sasaran kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar, tujuan dan sasaran kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten nganjuk khususnya yang berada di kawasan selingkar wilis sudah sangat jelas dan terukur dengan adanya pemetaan potensi wisata di tiga kecamatan yang berada di kawasan selingkar wilis meliputi kecamatan Sawahan, kecamatan Loceret, dan kecamatan Ngetos

Dari aspek sumberdaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek sumberdaya yang mendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten nganjuk khususnya yang berada di kawasan selingkar wilis ternyata kurang mumpuni baik dari segi kualitas sumberdaya manusianya maupun kuantitasnya, dimana masalah pendidikan, keterampilan dan jumlah tenaga kerja yang mengelola obyek wisata tidak sebanding dengan luas dan banyaknya obyek wisata yang tersebar di tiga kecamatan kawasan selingkar wilis meliputi kecamatan Sawahan, kecamatan Loceret, dan kecamatan Ngetos.

Pada aspek karakteristik agen pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek karakteristik organisasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten nganjuk khususnya yang berada di kawasan selingkar wilis ternyata menunjukkan fakta yang kontradiktif antar organisasi formal dan organisasi informal, dimana karakteristik organisasi formal cenderung mengarah pada pelaksana kebijakan top down yang hanya menunggu dan melaksanakan instruksi dari bupati, sedangkan dari organisasi informal justru memiliki kecenderungan memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi pariwisata di sekitarnya diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal.

Dari aspek sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal secara umum mendukung adanya perda nomor 9

tahun 2019 ini karena memiliki tujuan yang sama untuk mengimplementasikan pengembangan pariwisata di nganjuk terutama yang berada di kawasan selingkar wilis. Namun menjadi sangat bertolak belakang dalam sikap pelaksanaannya, dimana para pelaksana di organisasi formal cenderung apatis dan terkesan hanya menunggu perintah atasannya. Sedangkan para pelaksana dari organisasi informal justru tetap semangat dengan kesadaran yang kuat untuk terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya.

Dari aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Dinas kepemudaan, olahraga, budaya dan pariwisata sudah berupaya melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan cara melakukan berbagai sosialisasi dan koordinasi baik secara formal maupun informal dalam upaya pelaksanaan pengembangan pariwisata di kabupaten nganjuk terutama di kawasan selingkar wilis

Dari aspek lingkungan social, ekonomi dan politik, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi, politik dan sosial di Kabupaten Nganjuk khususnya kawasan selingkar wilis dalam pengembangan pariwisata mengalami permasalahan dimana dalam sisi ekonomi dan sosial dengan belum pulihnya roda perekonomian dan kegiatan sosial kebudayaan pendukung pariwisata di kawasan selingkar wilis pasca hantaman covid. Hal ini diperparah dari aspek politik dengan bergesernya kepentingan politik dalam pengembangan pariwisata di nganjuk yang awalnya mendukung penuh pengembangan pariwisata di kawasan selingkar wilis yang notabene masuk pada program PSN pada tahun 2018 bergeser ke kawasan utara nganjuk dengan dibangunnya bendungan semantok yang juga masuk kategori PSN dan tidak harus terjadi tarik menarik kepentingan politik kewenangan wilayah dan porsi pembagian penganggaran seperti yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di kawasan selingkar wilis yang melibatkan enam daerah kabupaten, provinsi dan pusat.

**Tabel 1. Matrik Hasil Penelitian**

No	Fokus Penelitian	Hasil
Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis		
	Standar dan sasaran kebijakan	sudah sangat jelas dan terukur dengan adanya pemetaan potensi wisata di tiga kecamatan yang berada di kawasan selingkar wilis meliputi kecamatan sawahan, kecamatan loceret, dan kecamatan ngetos
	Sumberdaya	Sumberdaya manusia kurang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sumberdaya waktu dan finansial mengalami kendala. Karena anggaran wisata dari APBD difokuskan pada aspek pengembangan potensi-potensi wisata dan rehabilitasi destinasi wisata yang sudah ada. Sedangkan pengembangan Destinasi wisata di kawasan selingkar wilis penganggarannya diajukan ke pemerintah pusat melalui jalur DAK (Dana Alokasi Khusus) dan ternyata hingga 3-4 tahun ini belum terealisasi.
	Karakteristik Agen Pelaksana	Terjadi kontradiksi antara organisasi formal dan organisasi informal. Dimana karakteristik organisasi formal cenderung mengarah pada pelaksana kebijakan top down yang hanya menunggu dan melaksanakan instruksi dari bupati. Sedangkan dari organisasi informal justru memiliki kecenderungan memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi pariwisata di sekitarnya

	Sikap Para Pelaksana	bertolak belakang dalam sikap pelaksanaannya, dimana para pelaksana di organisasi formal cenderung apatis dan terkesan hanya menunggu perintah atasannya. Sedangkan para pelaksana dari organisasi informal justru tetap semangat dengan kesadaran yang kuat untuk terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya
	Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	pihak pemerintah dalam hal ini Disporabudpar sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat dengan cara melakukan berbagai sosialisasi dan koordinasi baik secara formal dan informal dalam upaya pelaksanaan pengembangan pariwisata di kabupaten nganjuk terutama di kawasan selingkar wilis
	Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik	mengalami permasalahan dimana dalam sisi ekonomi dan social dengan belum pulihnya roda perekonomian dan kegiatan social kebudayaan pendukung pariwisata di kawasan selingkar wilis pasca hantaman covid. Hal ini diperparah dari aspek politik dengan bergesernya kepentingan politik dalam pengembangan pariwisata di nganjuk yang awalnya mendukung penuh pengembangan pariwisata di kawasan selingkar wilis yang notabene masuk pada program PSN pada tahun 2018 bergeser ke kawasan utara nganjuk dengan dibangunnya bendungan semantok yang juga masuk kategori PSN dan tidak harus terjadi tarik

		menarik kepentingan politik kewenangan wilayah dan porsi pembagian penganggaran seperti yang terjadi dalam pengembangan pariwisata di kawasan selingkar wilis yang melibatkan enam daerah kabupaten, provinsi dan pusat
<b>Faktor Pendukung dan Penghambat</b>		
	Faktor pendukung	standar, sasaran, dan tujuan kebijakan, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sector informal, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
	Faktor Penghambat	sumberdaya manusia, waktu dan finansial, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sector formal, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Sumber: Data dioalah peneliti, 2023

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan selingkar wilis kurang berjalan dengan baik, dimana kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya kurang memadai, waktu implementasi yang *molor* bahkan stagnan dan finansial yang masih mengandalkan anggaran dari DAK, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sektor formal yang cenderung apatis, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kurang kondusif. Meskipun sudah ada kejelasan dari aspek standar dan sasaran kebijakan, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sektor informal yang antusias ditengah ketidakpastian lingkungannya, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang cukup terkoordinir dengan baik.

Faktor-faktor yang mendukung dalam Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan selingkar wilis, meliputi: meliputi standar, sasaran, dan tujuan kebijakan, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sector informal, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi

sumberdaya manusia, waktu dan finansial, karakteristik dan disposisi agen pelaksana sektor formal, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

### *Saran*

Bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata terus menjalin komunikasi dengan semua stakeholders terutama dengan sector-sektor terkait di lingkungan pemerintah daerah kabupaten nganjuk dalam mengembangkan pariwisata di kawasan selingkar wilis.

Bagi pelaku pariwisata lokal diharapkan semakin mandiri dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekitarnya untuk dijadikan spot pariwisata baru guna meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

### **REFERENSI**

- Aminah, S. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. *Jakarta: Kencana*.
- Hanief, S., Pramana, D., Kom, S., & Kom, M. (2018). *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*. Penerbit Andi.
- Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 94–103.
- INDONESIA, P. R. (n.d.). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10. TAHUN 2009..... TENTANG KEPARIWISATAAN*.
- Miles, H., & Huberman, A. M. (2018). Saldana.(2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*.
- Nasional, K. (2015). Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. Afadlal, dkk. 2005. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press. Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ali, M. Syamsi. 2007. Dai Muda di New York City. Jakarta: Gema Insani Press. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1).
- Ridwan, M., & Hadyanto, S. (2012). *Perencanaan pengembangan pariwisata*. Sofmedia.
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media.



Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.

Suwantoro, G. (2019). *Dasar-dasar pariwisata*.